

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Khakim. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Ahmad Rizki Sridadi. (2016). *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Malang: Empatdua Media.
- Asri Wijayati. (2011). *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*. Lubuk Agung: Surabaya.
- Dedi Istamullah. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djumaiddi. (2004). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Haiyani Rumondang. (2018). *Hubungan Industrial, Pendekatan Komprehensif-Inter Disiplin, Teori-Kebijakan-Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Imam Soepomo. (1997). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan 1997.
- Jimmy Jos Sembiring. (2016). *Hak Dan Kewajiban Pekerja*. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lalu Husni. (2006). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo.
- Lanny Ramli. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhamammad Siddiq Armia. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

- Munir Fuady. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Mutiara S. Panggabean. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R. Joni Bambang S. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Setiawan. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsun Ismaya. (2018). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri, Cetakan ke 5.
- Sehat Damanik. (2006). *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: DSS Publishing.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Zaeni Asyhadie. (2007). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin, dkk. (2006). *Pengertian, Sifat dan Hakikat Hukum Perburuhan dalam Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Bandung: PT. Raja Grasindo Persada.

## Jurnal Artikel

Agus Antara Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia." 1 (2). (2020).

Agus Wijaya, Solechan, Suhartoyo. "Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," Diponegoro Law Jurnal, 11(2). (2022).

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan Di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung", Journal of Empowerment, 1 (1). (2007)

Aji Halim Rahman. "Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*)," Presumption of Law, 3 (2). (2021)

Andi Akhirah Khairunnisa. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 5 (1). (2018).

Benuf, kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7 (1). (2009).

Cahyo Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Pada Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Dampak Pandemi Covid-19." Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat. 21 (1). (2023)

Farza, R. R., Karsona, A. M., & Rubiati, B. "Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak". Jurnal Bina Mulia Hukum, 4 (1). (2021).

- Habib Iiftighar Wibowo. “Tindakan Pengusaha Yang Tidak Mempesiunkan Pekerja Setelah Melewati Usia Pensiun”. *Jurist-Diction*. 3 (3). (Mei 2020).
- Haposan Siallagan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”. *Jurnal Sosiohumaniora*, (18) 2. (2016).
- Indra Agus Priyanto. “Implementasi Terhadap Pemberian Uang Kompensasi Bagi Karyawan PKWT”. *Journal Iuris Scientia* 1(1). (2023).
- Ismi Hasanah, Dwi Aryanti Ramadhani. Pemenuhan Hak Pekerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Gorontalo Law Review*. 4 (1).
- Mawar Sitohang. “Menguji Keadilan Dalam Penerapan Hak Pensiun Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan”. *Honeste Vivere Journal*. 34. (1). (2024).
- Micael Josviranto. “Tinjauan Yuridis Perusahaan Dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*. 7 (1).
- Mohammad Ilyas. “Pengambilalihan Dan Penutupan Perusahaan Yang Berdampak Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Ius Constituendum* 3 (1). (2018)
- M. Rikhardus Joka. “Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja Yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja”. *Binamulia Hukum*, 9 (1). (2020).

- Muhammad Asri Rajani Maha and Arifuddin Muda Harahap. “Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terkait Ketentuan Waktu Istirahat Bagi Pekerja/Buruh”. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia 9 (1). (2023).
- Neni Sri Wahyuni. “Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun Bagi Pekerja Indonesia”. Jurnal Jamsostek 2 (1).
- Nikodemus Maringan. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 3. (2015).
- Nopita Sari, Saut Parulian Panjaitan, Suci Flambonita. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Memasuki Usia Pensiun”. Jurnal Hukum Sehasen. 10 (1).
- Rachmatika Lestari, Rosa Maulida Wirna, Farhan Deka Fahreza, Cut Ali Sahbana. “Pendampingan Bipartit Dalam Kasus Ketenagakerjaan”. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia. 5 (1) (2020).
- Rano Ardiansyah, Julius Kurnaedi, Jimmy Lim, Calvin, Alden Nelson. “Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama Pada Perusahaan Manufaktur di Kota Batam, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara. 4 (2). (Juni 2023).
- Rico Saputra Ginting. “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Atas Kesalahan Berat”. “Dharmasiswa” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2 (38). (2022).

- Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin. “Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Pengadilan Negeri Makassar: Studi Kasus No: 1/Pdt Sus-PHI/2020/PN.Mks”. *Journal of Lex Theory*.1 (2). (2020).
- Rizki Akbar Maulana, Imam Budi Santoso. “Analisis Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dikarenakan Alasan Usia”. *Jurnal Perspektif Hukum* 21 (2). (2021).
- Sonhaji. Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja. *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (1). (2019).
- Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”. *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (2). (2019).
- Zulkarnain Ridlwan. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 5 (2). (2012).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu,

Alih Daya, Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan dalam butir B rumusan hukum kamar Perdata Khusus.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suroyo  
Kampus Universitas Diponegoro  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206  
Laman: [www.fh.undip.ac.id](http://www.fh.undip.ac.id), Pos-el: fh[at]ive.undip.ac.id

Nomor : 192 /UN7.F1/AK/V/2025  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi

09 MAY 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang  
Jl. Siliwangi No.512 Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagaimana tercantum dalam kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memerlukan beberapa data/informasi sebagai bahan referensi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pengambilan data/informasi dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Noval Maulana Rosyadi  
NIM : 11000121130251  
semester : 8 (delapan)  
mata kuliah : Tugas Akhir (Skripsi)  
alamat : Jl. Sumurboto Barat 2, Kav 1, Banyumanik, Kota Semarang.  
nomor HP : 081212821144

data/informasi : Wawancara kepada Hakim yang mengadili perkara pada  
yang diperlukan : Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/ PN  
Smg

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. N.  
NIP 196711191993032002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang- 50148  
[www.pn-semarangkota.go.id](http://www.pn-semarangkota.go.id), [pn.semarangkota@gmail.com](mailto:pn.semarangkota@gmail.com)

Nomor : 61/KPN/SKET.Riset.HK2/VI/2025  
Lampiran : ---  
Perihal : Surat Keterangan Riset

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas  
IA Khusus menerangkan bahwa :

N a m a : NOVAL MAULANA ROSYADI  
N I M : 11000121130251  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro (UNDIP)  
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang  
Kelas IA Khusus tanggal 24 Juni 2025 sehubungan dengan penyusunan Skripsi  
dengan judul:

**“Analisis Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena  
Usia Pensiun (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 24 Juni 2025  
A.n Ketua Pengadilan Negeri Semarang  
Wakil Ketua



**ROMMEL FRANCISKUS TAMPUBOLON, SH**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BsrE  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”